

PERAN HIPMI SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN LITERASI EKONOMI SYARIAH DALAM UPAYA Mendukung PERTUMBUHAN INDUSTRI HALAL DI KAB. PURWAKARTA

Tri Prayogi¹, Muhammad Fakhri²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia

prayoginta@yahoo.co.id

muhammad.fakhri@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai ekonomi serta keuangan Islam yang berdampak pada minimnya partisipasi dalam sistem ekonomi syariah melatarbelakangi dilaksanakannya penelitian ini dan analisis mengenai peran HIPMI Syariah dalam meningkatkan literasi ekonomi Islam serta mendukung pertumbuhan industri halal di Kabupaten Purwakarta dijadikan sebagai fokus utama sedangkan peneliti mengadopsi metode kualitatif deskriptif-analitik dengan paradigma konstruktivisme guna mencapai tujuan tersebut. Literasi ekonomi syariah serta perkembangan industri halal ditingkatkan secara efektif melalui edukasi publik dan dukungan kebijakan serta pemanfaatan teknologi digital sebagaimana ditunjukkan oleh hasil penelitian, yang mana peran strategis dijalankan oleh HIPMI Syariah melalui kolaborasi bersama pemerintah serta pelaku UMKM dan lembaga keuangan syariah dalam wujud pelatihan dan edukasi serta media digital. Namun, Berbagai kendala yang masih mencakup organisasi yang relatif baru serta koordinasi yang belum optimal dan kesenjangan akses informasi maupun keterbatasan kualitas SDM meniscayakan dilakukannya penguatan kerja sama antar pemangku kepentingan serta peningkatan kompetensi pelaksana program dan UMKM dan standardisasi materi edukasi agar literasi ekonomi Islam dapat berkembang secara merata dan berkelanjutan.

Kata kunci: Hipmi syariah, pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan industri halal

ABSTRACT

The low level of public knowledge regarding Islamic economics and finance, which has resulted in limited participation in the Islamic economic system, forms the background of this study. The analysis of the role of HIPMI Syariah in improving Islamic economic literacy and supporting the growth of the halal industry in Purwakarta Regency is the main focus of this research. The researcher adopts a descriptive-analytical qualitative method within a constructivist paradigm to achieve the study's objectives. The findings indicate that Islamic economic literacy and the development of the halal industry can be effectively enhanced through public education, policy support, and the utilization of digital technology. In this regard, HIPMI Syariah plays a strategic role through collaboration with the government, MSME actors, and Islamic financial institutions in the form of training programs, educational activities, and digital media utilization. However, several challenges remain, including the relatively new organizational structure, suboptimal coordination, information access disparities,

and limitations in human resource quality. These issues necessitate strengthened inter-stakeholder collaboration, improved competency of program implementers and MSME actors, and the standardization of educational materials so that Islamic economic literacy can develop in a more equitable and sustainable manner.

Keywords: *HIPMI Syariah, government, Islamic financial institutions, halal industry.*

Naskah diterima : 5 Maret 2026, Naskah dipublikasikan : 14 Maret 2026

PENDAHULUAN

Pertumbuhan pada level yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir telah ditunjukkan oleh perkembangan industri halal serta tidak lagi terbatasnya ekosistem ekonomi tersebut pada produk makanan halal semata karena cakupannya telah meluas hingga menyentuh sektor fashion dan kosmetik serta pariwisata sampai pada ranah teknologi digital. Secara global, industri halal mengalami perkembangan yang sangat signifikan (Natsir, 2024). Data proyeksi 2026 memperkirakan nilai ekonomi halal global melampaui angka US\$3 triliun (Purnama, 2026) dan posisi krusial dalam tatanan perekonomian dunia saat ini telah ditempati oleh perkembangan industri makanan halal serta keuangan syariah dan kosmetik halal maupun gaya hidup halal.

Ekonomi syariah telah diposisikan sebagai komponen krusial dalam perekonomian kontemporer melalui peningkatan kesadaran masyarakat global terhadap produk halal guna menyediakan alternatif yang selaras dengan prinsip Islam serta pengembangan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia turut didukung oleh besarnya jumlah populasi Muslim sebagai faktor pendorong utama. Data *Global Religious Futures* (2018) Posisi pertama sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia ditempati oleh Indonesia melalui jumlah penduduk yang mencapai 209,12 juta jiwa pada tahun 2010 atau setara dengan 87% dari total populasi serta diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan hingga menyentuh angka 229,62 juta jiwa pada tahun 2020 (Saputri, 2020). Potensi pengembangan industri halal yang mengintegrasikan berbagai sektor strategis mencakup makanan serta minuman dan kosmetik dan farmasi dan keuangan serta pariwisata hingga fesyen secara signifikan dimiliki oleh Indonesia.

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap urgensi konsumsi produk sesuai prinsip syariah telah memicu pertumbuhan sektor ini serta menempatkan keuangan syariah sebagai instrumen vital dalam mendukung ekosistem industri halal melalui penawaran model pembiayaan yang adil serta transparan sesuai prinsip ekonomi Islam oleh sistem keuangan syariah yang telah terbebas dari unsur riba serta maisir dan gharar. Akses pembiayaan serta investasi dan ekspansi usaha bagi para pelaku industri halal difasilitasi oleh lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank meskipun pada prosesnya pengembangan sektor tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang meliputi keterbatasan jangkauan pendanaan serta rendahnya edukasi pelaku usaha mengenai produk keuangan syariah dan belum optimalnya koordinasi sinergi di antara para stakeholder. Oleh karena itu, Pertumbuhan sektor halal perlu didukung melalui pemetaan peran strategis keuangan syariah secara sistematis dan terukur karena industri tersebut telah bertransformasi menjadi salah satu pilar ekonomi strategis yang berkembang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir seiring meningkatnya kesadaran umat Muslim terhadap pentingnya produk serta layanan yang berlandaskan prinsip syariah, serta cakupan tren halal tersebut kini tidak lagi terbatas pada bidang makanan dan minuman karena telah meluas ke sektor farmasi maupun kosmetik dan fashion serta pariwisata hingga sektor keuangan. Posisi yang sangat potensial guna menjadi pusat industri halal dunia dimiliki oleh Indonesia di tengah

arus globalisasi serta persaingan ekonomi yang semakin ketat mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk halal.

Peningkatan kesadaran publik terhadap komoditas halal dirasakan secara signifikan oleh konsumen Muslim serta masyarakat non-Muslim yang menaruh minat pada produk yang sehat dan aman serta beretika sehingga relevansi industri halal yang tidak lagi terbatas bagi umat Islam saja berhasil dibuktikan oleh fenomena tersebut melalui kepemilikan daya tarik yang bersifat global. Kontribusi ekonomi syariah secara fundamental mendasari perkembangan industri halal serta berperan sebagai landasan utama dalam mengekspansi model ekonomi yang berakar pada nilai-nilai Islam.

Belum optimalnya pemanfaatan potensi besar tersebut disebabkan oleh adanya berbagai hambatan pengembangan, yang meliputi keterbatasan dukungan finansial berbasis syariah serta kurangnya sosialisasi pengetahuan ekonomi dan keuangan syariah kepada masyarakat dan para pelaku industri. Informasi mengenai transaksi Syariah sulit didapatkan oleh banyak pelaku usaha halal padahal data terkait pembiayaan Syariah beserta ketentuannya siap disediakan oleh berbagai lembaga organisasi berbasis Syariah yang melimpah, sehingga peran lembaga organisasi syariah tersebut menjadi krusial dan nilai strategis dimiliki oleh integrasi sektor ekonomi syariah serta industri halal dalam konteks pembangunan. Komitmen dalam pengembangan ekonomi syariah telah dinyatakan oleh pemerintah melalui beragam kebijakan seperti pembentukan Komite Nasional Ekonomi serta HIPMI Syariah dan penerapan sertifikasi halal wajib, sekaligus sinergi yang lebih kuat antara para pemangku kepentingan mulai dari regulator dan Lembaga Syariah hingga pelaku industri serta masyarakat konsumen masih terus diupayakan agar fenomena tersebut dapat dijadikan landasan fundamental bagi peneliti dalam mengeksplorasi kontribusi nyata dari lembaga organisasi syariah seperti HIPMI Syariah.

Penelitian ini bertujuan agar peran HIPMI Syariah dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah di Kabupaten Purwakarta dapat diidentifikasi serta berbagai upaya yang dilakukan lembaga tersebut dalam mendukung pertumbuhan industri halal di wilayah terkait dianalisis secara mendalam dan pengaruh dari peningkatan literasi ekonomi syariah terhadap perkembangan industri halal di Kabupaten Purwakarta dapat dipahami sepenuhnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitik diterapkan dalam studi ini dan pemilihan metode tersebut dilakukan guna memahami secara komprehensif mengenai peran HIPMI Syariah dalam penguatan literasi ekonomi syariah serta dampaknya bagi perkembangan industri halal di wilayah Kabupaten Purwakarta, sehingga variabel penelitian tidak sekadar diukur melalui hubungan statistik semata.

Realisme sosial dimaknai melalui penerapan paradigma konstruktivisme berdasarkan pengalaman serta perspektif subjektif para aktor yang terlibat secara langsung pada organisasi HIPMI Syariah dan ekosistem industri halal di Purwakarta dengan menetapkan Kantor HIPMI Syariah Kabupaten Purwakarta serta wilayah operasional industri halal di Kabupaten Purwakarta sebagai lokasi serta waktu pelaksanaan penelitian. Sepuluh orang informan yang mencakup pengurus aktif HIPMI Syariah Kabupaten Purwakarta serta pelaku usaha yang terafiliasi dengan program organisasi tersebut dan tokoh ekonomi syariah atau ulama lokal serta perwakilan Dinas Koperasi UMKM atau Perindustrian Kabupaten Purwakarta ditetapkan sebagai subjek penelitian karena kesediaan mereka memberikan informasi secara terbuka, sementara itu peneliti menghimpun data primer melalui wawancara mendalam bersama Ketua serta pengurus HIPMI dan pelaku UMKM serta observasi lapangan dan dokumentasi sekaligus mengumpulkan data sekunder dari dokumen internal organisasi

HIPMI Syariah untuk kemudian diolah menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses reduksi data serta penyajian data dan penarikan kesimpulan sesuai rujukan Miles, Huberman dan Saldaña (2014) diterapkan guna menganalisis data yang telah terkumpul serta triangulasi sumber digunakan dalam penelitian ini untuk menjamin keabsahan data melalui perbandingan dan pengkajian informasi dari berbagai referensi seperti buku dan jurnal ilmiah serta laporan lembaga pemerintah maupun dokumen organisasi HIPMI Syariah sehingga validitas dan kredibilitas hasil penelitian dapat ditingkatkan secara optimal. (Sugiyono, 2022).

LANDASAN TEORI

Industri Halal

Berbagai barang dan jasa yang selaras dengan prinsip syariah Islam dihasilkan oleh industri halal sebagai sektor ekonomi yang mencakup bidang makanan dan minuman halal dan kosmetik dan farmasi dan fesyen muslim dan pariwisata halal serta jasa keuangan syariah, yang mana perkembangannya saat ini tidak hanya dipicu kebutuhan masyarakat muslim melainkan juga didorong meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kualitas serta keamanan dan kebersihan produk yang dikonsumsi. (Bank Indonesia, 2024).

Potensi besar dalam pengembangan industri halal dimiliki oleh Indonesia sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan eskalasi permintaan terhadap produk halal serta berbagai kebijakan pemerintah dalam penguatan ekosistem ekonomi syariah menyokong secara signifikan potensi tersebut. Oleh karena itu, industri halal menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global (Kementerian PPN/Bappenas, 2023).

Sertifikasi halal dipandang sebagai aspek krusial dalam industri halal serta dijadikan sebagai bukti autentik pemenuhan standar kehalalan berdasarkan ketentuan syariat Islam oleh suatu produk yang mana penyelenggaraannya telah diregulasi melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia demi menjamin pemberian perlindungan serta kepastian bagi konsumen saat mengonsumsi produk tersebut. (Republik Indonesia, 2014).

Dalam konteks Kabupaten Purwakarta, Peluang pengembangan yang signifikan dimiliki oleh industri halal khususnya pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di mana dukungan sumber daya manusia yang menguasai prinsip ekonomi syariah sangat dibutuhkan dalam proses pertumbuhannya sehingga penguatan literasi ekonomi syariah diposisikan sebagai faktor fundamental yang menggerakkan pelaku usaha untuk mengadopsi standar halal demi terciptanya entitas bisnis yang berdaya saing serta berkelanjutan. (OJK, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran HIPMI Syariah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah sebagai usaha mendukung pertumbuhan industri halal di Kabupaten Purwakarta dianalisis melalui penelitian ini serta wawancara mendalam bersama Bapak Subari yang bertindak sebagai pelaku UMKM dan Bapak A Ghozin Abdil Aziz selaku Ketua HIPMI Syariah Kabupaten Purwakarta menyediakan data penelitian tersebut secara komprehensif.

Peneliti menemukan fakta mengenai minimnya tingkat pemahaman terkait makna halal pada kalangan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Purwakarta melalui pelaksanaan serangkaian kegiatan pengamatan serta wawancara. Pemahaman yang bersifat dangkal dimiliki oleh mayoritas subjek melalui penyampaian jawaban seragam terkait penggunaan bahan halal akibat ketiadaan unsur yang

diharamkan serta penguasaan konsep halal secara komprehensif masih dirasakan kurang sehingga akses informasi mengenai industri halal pun masih sulit untuk dijangkau oleh sebagian besar dari mereka.

Beberapa faktor melatarbelakangi minimnya tingkat pemahaman tersebut yang mencakup rendahnya pengetahuan serta kemampuan literasi membaca para pelaku usaha dan didukung oleh signifikansi peran lingkungan serta riwayat pendidikan formal yang mayoritas hanya ditempuh sampai jenjang sekolah dasar atau menengah sehingga keterbatasan akademis tersebut secara langsung memengaruhi sempitnya wawasan mereka terhadap sektor industri halal.

Peningkatan literasi ekonomi syariah secara terstruktur diupayakan oleh HIPMI Syariah Kabupaten Purwakarta melalui pelaksanaan berbagai program edukasi dan pelatihan kewirausahaan syariah serta seminar dan pendampingan UMKM, bahkan sosialisasi mengenai signifikansi sertifikasi halal serta pemanfaatan produk keuangan syariah sebagaimana telah dipaparkan oleh Bapak A Ghozin Abdil Aziz berdasarkan hasil wawancara. Peningkatan pemahaman masyarakat serta para pelaku UMKM mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan usaha diupayakan melalui pelaksanaan program tersebut.

Menurut Bapak A. Ghozin Abdil Aziz, Rendahnya tingkat pemahaman sebagian pelaku usaha mengenai konsep ekonomi syariah serta urgensi penerapan standar halal dalam setiap proses bisnis merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi sehingga edukasi dan pendampingan diberikan secara aktif oleh HIPMI Syariah kepada pelaku usaha agar prinsip syariah dapat diimplementasikan dalam seluruh kegiatan operasional mereka.

Sementara itu, Manfaat dalam peningkatan pengetahuan mengenai pengelolaan usaha berbasis syariah bagi pelaku UMKM ditunjukkan melalui hasil wawancara dengan Bapak Subari atas kegiatan yang diselenggarakan oleh HIPMI Syariah, serta diungkapkan oleh beliau bahwa pemahaman terkait transaksi sesuai syariah dan urgensi sertifikasi halal dan strategi pengembangan usaha berorientasi nilai Islam telah diperoleh para pelaku usaha melalui rangkaian pelatihan serta sosialisasi yang diikuti.

Bantuan bagi pelaku UMKM dalam perluasan jaringan usaha dan perolehan informasi peluang pasar halal serta penguatan kesadaran terhadap kualitas dan kehalalan produk dinilai oleh Bapak Subari sebagai bentuk kontribusi nyata eksistensi HIPMI Syariah yang secara simultan menunjukkan bahwa dampak positif telah dihasilkan oleh berbagai program tersebut terhadap peningkatan literasi ekonomi syariah dan pengembangan industri halal di Kabupaten Purwakarta.

Secara keseluruhan, Kebutuhan mendesak untuk memperkuat pemahaman serta kesadaran kolektif mengenai urgensi pengetahuan industri halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Purwakarta digambarkan secara jelas oleh temuan penelitian ini, serta pertumbuhan sektor halal di wilayah tersebut turut dipicu secara positif melalui intensifikasi literasi ekonomi syariah oleh HIPMI Syariah sehingga para pelaku usaha sangat mengharapkan kehadiran organisasi tersebut dalam memberikan strategi edukasi yang lebih taktis dan dukungan pengetahuan yang holistik agar konsep halal dapat dipahami secara mendalam sekaligus diimplementasikan dalam aktivitas manajerial bisnis mereka. Penerapan standar halal dalam proses produksi serta peningkatan kualitas produk dan perluasan peluang pemasaran didorong oleh meningkatnya pemahaman pelaku usaha mengenai konsep halal serta ekonomi syariah, sehingga fungsi sebagai penggerak penguatan ekosistem industri halal di tingkat daerah dijalankan oleh HIPMI Syariah melampaui perannya sebagai sekadar organisasi pengusaha. (Kementerian PPN/Bappenas, 2023; Bank Indonesia, 2024).

Pengertian HIPMI Syariah dan Perannya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

Pengembangan kewirausahaan serta ekonomi berbasis syariah difokuskan oleh HIPMI Syariah selaku badan otonom dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan pembangunan ekosistem bisnis yang berlandaskan nilai Islam seperti kejujuran serta keadilan serta transparansi serta keberkahan dalam aktivitas ekonomi disasar oleh lembaga tersebut (HIPMI Syariah, 2023) sekaligus peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui kegiatan edukasi serta pelatihan dan pendampingan usaha syariah didorong oleh HIPMI Syariah dalam kapasitasnya sebagai organisasi pada konteks Kabupaten Purwakarta. Upaya penguatan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah dilakukan oleh HIPMI Syariah Kabupaten Purwakarta di bawah arahan A Ghozin Abdil Aziz sebagai fondasi pengembangan industri halal berdaya saing (Aziz komunikasi personal, 15 Mei 2026) dan langkah tersebut dipandang selaras dengan pernyataan Otoritas Jasa Keuangan mengenai krusialnya literasi ekonomi serta keuangan syariah bagi pemahaman publik terkait berbagai produk layanan serta aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. (OJK, 2024).

Program HIPMI Syariah dalam Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan A. Ghozin Abdil Aziz, HIPMI Syariah Kabupaten Purwakarta melaksanakan berbagai program yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM terhadap ekonomi syariah.

a. Sosialisasi dan Edukasi Ekonomi Syariah

Pemahaman para pelaku usaha mengenai penerapan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis ditingkatkan melalui penyelenggaraan program sosialisasi yang mencakup seminar serta diskusi dan penyuluhan mengenai konsep dasar ekonomi syariah dan prinsip bisnis Islam maupun akad syariah serta etika bisnis yang sesuai dengan syariat Islam sebagaimana dikemukakan oleh Aziz dalam komunikasi personal pada 15 Mei 2026. Prinsip-prinsip ekonomi syariah dijadikan sebagai landasan fundamental bagi pelaku usaha oleh Antonio (2019) dalam mengimplementasikan aktivitas ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai Islam, serta menjauhkan diri dari berbagai praktik yang memuat unsur riba dan gharar maupun maisir.

b. Pelatihan Kewirausahaan Syariah

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan oleh HIPMI Syariah yang turut mencakup manajemen usaha dan pemasaran serta pengelolaan keuangan syariah dan pengembangan bisnis halal diorientasikan pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar pengembangan usaha dapat dilakukan secara profesional serta berkelanjutan. (Aziz, komunikasi personal, 15 Mei 2026). Urgensi peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai determinan primer dalam pengembangan usaha yang menjadi penekanan utama konsep pemberdayaan UMKM telah diakomodasi melalui penyelenggaraan pelatihan tersebut dan dipandang selaras dengan perspektif teoretis yang dirujuk (Tambunan, 2020).

c. Pendampingan Sertifikasi Halal

Pengembangan industri halal sangat dipengaruhi oleh sertifikasi halal sebagai salah satu aspek krusial serta pendampingan mengenai proses pengajuan sertifikasi halal dan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) diberikan oleh HIPMI Syariah kepada para pelaku usaha sebagaimana diungkapkan oleh Aziz, komunikasi personal 15 Mei 2026 dan kepastian hukum diberikan serta kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan ditingkatkan melalui sertifikasi halal yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

d. Penguatan Jaringan dan Kolaborasi Bisnis

Pembangunan kerja sama diupayakan oleh HIPMI Syariah bersama pemerintah daerah serta akademisi serta lembaga keuangan syariah serta pelaku usaha demi penguatan ekosistem ekonomi syariah di Kabupaten Purwakarta, sehingga kolaborasi tersebut memicu perluasan akses pembiayaan serta pemasaran serta pengembangan usaha bagi UMKM. (Aziz, komunikasi personal, 15 Mei 2026).

Peran HIPMI Syariah dalam Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah

Peran sebagai edukator serta fasilitator dan motivator dalam upaya peningkatan literasi ekonomi syariah telah dijalankan oleh HIPMI Syariah Kabupaten Purwakarta melalui pemberian pemahaman mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah kepada para pelaku usaha, sekaligus penyediaan berbagai program pelatihan serta pendampingan guna membantu diterapkannya prinsip syariah di dalam kegiatan bisnis secara menyeluruh. Pelaku usaha didorong oleh HIPMI Syariah selaku motivator guna mengembangkan bisnis yang kompetitif sekaligus tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam (Aziz komunikasi personal 15 Mei 2026) dan pernyataan Bapak Subari mendukung temuan ini melalui penjelasan bahwa program penyelenggaraan HIPMI Syariah tersebut telah berhasil meningkatkan pengetahuan serta kesadaran pelaku usaha terkait urgensi implementasi bisnis sesuai prinsip syariah (Subari komunikasi personal 18 Mei 2026). Menurut Rahmawati dan Hidayat (2022), organisasi kewirausahaan berbasis syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui transfer pengetahuan, pendampingan, dan penguatan jaringan usaha.

Kontribusi Literasi Ekonomi Syariah terhadap Pertumbuhan Industri Halal

Pertumbuhan industri halal dipengaruhi secara signifikan oleh literasi ekonomi syariah dan berbagai aspek yang mencakup kehalalan produk serta etika bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi halal cenderung lebih diperhatikan oleh pelaku usaha dengan pemahaman ekonomi syariah yang baik. (Bank Indonesia, 2023). Pelaku UMKM didorong untuk lebih memahami urgensi pemeliharaan kualitas serta kehalalan produk guna meningkatkan kepercayaan konsumen melalui rangkaian kegiatan yang dilaksanakan HIPMI Syariah (Subari komunikasi personal 18 Mei 2026), serta hal ini selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Bank Indonesia (2023) bahwa pengembangan ekosistem industri halal nasional didukung secara signifikan oleh peningkatan literasi ekonomi syariah sebagai salah satu faktor utamanya.

Hambatan dan Solusi dalam Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah

Peningkatan literasi ekonomi syariah oleh HIPMI Syariah Kabupaten Purwakarta dihambat oleh rendahnya tingkat pemahaman masyarakat serta minimnya kesadaran terkait sertifikasi halal dan keterbatasan sumber daya guna menjangkau seluruh pelaku UMKM, sebagaimana ditemukan dalam hasil penelitian (Aziz komunikasi personal 15 Mei 2026).

Literasi ekonomi serta keuangan syariah di Indonesia yang dilaporkan masih relatif lebih rendah dibandingkan literasi keuangan konvensional oleh OJK (2024) mengisyaratkan diperlukannya implementasi upaya yang lebih intensif dari berbagai pihak guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ekonomi syariah secara menyeluruh.

Program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui instrumen seminar serta pelatihan dan workshop hingga kegiatan pendampingan berkelanjutan diperkuat oleh HIPMI Syariah Kabupaten Purwakarta guna mengatasi berbagai hambatan dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah dan pemanfaatan media digital seperti media sosial serta website dan webinar dioptimalkan agar jangkauan informasi ekonomi syariah pada masyarakat luas dapat diperluas, serta peningkatan kesadaran pelaku UMKM mengenai urgensi sertifikasi halal diupayakan melalui sosialisasi maupun pendampingan proses sertifikasi secara langsung. Penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah serta lembaga keuangan syariah dan perguruan tinggi maupun organisasi terkait perlu diupayakan oleh

HIPMI Syariah guna memperluas jangkauan program literasi dan memperoleh dukungan sumber daya yang memadai serta kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan bagi pengelola program dan pendamping UMKM harus ditingkatkan supaya penyampaian materi menjadi lebih efektif sekaligus materi edukasi yang terstandarisasi dan sederhana serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat perlu disusun untuk memastikan pemahaman ekonomi syariah diterima secara merata sehingga literasi ekonomi syariah masyarakat diharapkan meningkat guna mendukung perkembangan industri halal di Kabupaten Purwakarta secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran HIPMI Syariah dalam Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah dalam Upaya Mendukung Pertumbuhan Industri Halal di Kabupaten Purwakarta, Peningkatan pemahaman serta kesadaran pelaku UMKM terhadap ekonomi syariah diupayakan secara strategis oleh HIPMI Syariah Kabupaten Purwakarta melalui pelaksanaan berbagai program yang meliputi sosialisasi ekonomi syariah dan pelatihan kewirausahaan syariah serta pendampingan sertifikasi halal hingga penguatan jaringan dan kolaborasi bisnis.

Ekosistem usaha yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah sedang diupayakan pembangunannya oleh HIPMI Syariah Kabupaten Purwakarta melalui kegiatan edukasi dan pendampingan bagi para pelaku usaha sesuai keterangan A. Ghazin Abdul Aziz selaku Ketua dan program tersebut dilaksanakan guna meningkatkan literasi ekonomi syariah agar pelaku UMKM mampu memahami serta mengimplementasikan prinsip syariah di dalam seluruh aktivitas usahanya. (Aziz, wawancara, 15 Mei 2026).

Sementara itu, Peningkatan pengetahuan mengenai pengelolaan usaha berbasis syariah serta urgensi sertifikasi halal dan peluang pengembangan usaha dalam industri halal ditunjukkan melalui hasil wawancara dengan Bapak Subari selaku pelaku UMKM atas keberadaan HIPMI Syariah, yang melalui berbagai kegiatannya turut memberikan kontribusi dalam perluasan jaringan bisnis serta peningkatan daya saing produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha. (Subari, wawancara, 18 Mei 2026).

Pertumbuhan industri halal di wilayah Kabupaten Purwakarta telah digerakkan oleh adanya penguatan literasi ekonomi syariah yang diinisiasi oleh HIPMI Syariah dan kondisi tersebut terjustifikasi melalui eskalasi kesadaran para pelaku UMKM dalam menginternalisasi prinsip syariah serta pemeliharaan standar kehalalan produk sekaligus pemahaman mengenai krusialnya sertifikasi halal demi memberikan jaminan kepada para konsumen.

Meskipun demikian, Rendahnya tingkat pemahaman sebagian masyarakat mengenai ekonomi syariah serta kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal dan keterbatasan sumber daya dalam menjangkau seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Purwakarta masih dihadapi sebagai kendala oleh HIPMI Syariah, sehingga pemerintah daerah serta lembaga pendidikan dan pelaku usaha perlu membangun sinergi kolektif guna memperkuat literasi ekonomi syariah dan mendorong pertumbuhan industri halal yang berkelanjutan.

Beberapa saran diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan agar HIPMI Syariah Kabupaten Purwakarta mengupayakan peningkatan intensitas serta cakupan program edukasi ekonomi syariah bagi pelaku UMKM melalui seminar dan pelatihan serta pendampingan berkelanjutan dan memperluas kerja sama dengan pemerintah daerah serta perguruan tinggi maupun lembaga keuangan syariah guna memperkuat pengembangan ekosistem industri halal di Kabupaten Purwakarta. Bagi pelaku UMKM, diharapkan lebih aktif mengikuti berbagai program yang diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman mengenai ekonomi syariah dan industri halal, serta

menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dalam kegiatan usahanya dan mengurus sertifikasi halal guna meningkatkan kepercayaan konsumen serta daya saing produk.

Dukungan yang lebih optimal terhadap pengembangan ekonomi syariah serta industri halal diharapkan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui kebijakan yang mendukung dan program pembinaan UMKM serta fasilitasi sertifikasi halal maupun penyediaan akses pembiayaan berbasis syariah, dan kontribusi dalam peningkatan literasi ekonomi syariah diharapkan turut diberikan oleh perguruan tinggi serta lembaga pendidikan melalui kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dan pelatihan yang melibatkan pelaku UMKM agar pemahaman masyarakat mengenai ekonomi syariah dapat terus berkembang. Bagi peneliti selanjutnya, Peneliti perlu melaksanakan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas program HIPMI Syariah terhadap peningkatan kinerja UMKM dan pertumbuhan industri halal melalui penggunaan pendekatan kuantitatif atau metode campuran, serta pelibatan jumlah informan yang lebih banyak agar diperoleh gambaran komprehensif mengenai peran HIPMI Syariah dalam pengembangan ekonomi syariah di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., & Muharir. (2021). *Peran ekonomi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era industri halal*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 11(2), 123–135. Tersedia di : <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3795>
- Antonio, M. S. (2019). *Prinsip dasar ekonomi dan perbankan syariah*. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Aziz, A. G. A. (2026, 15 Mei). *Wawancara mengenai peran HIPMI Syariah dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah di Kabupaten Purwakarta* [Komunikasi personal].
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia 2023*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2024*. Jakarta: Bank Indonesia.
- BPJPH. (2024). *Laporan Implementasi Jaminan Produk Halal Indonesia*. Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- Global Religious Futures. (2018). *The future of world religions: Population growth projections, 2010–2050*. Washington, DC: Pew Research Center.
- HIPMI Syariah. (2023). *Profil dan Program Pengembangan Kewirausahaan Syariah*. Jakarta.
- Ika, Aprilia (2024). *Perkuat Ekonomi Syariah dan Industri Halal, Pengusaha Muda Bentuk Hipmi Syariah*. Tersedia di : <https://money.kompas.com/read/2024/03/08/123040626/perkuat-ekonomi-syariah-dan-industri-halal-pengusaha-muda-bentuk-hipmi-syariah>.
- Innaroh, Maisha. (2024) *PERAN KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA*. Tersedia di : <file:///C:/Users/USER/Downloads/855-Article%20Text-3196-1-10-20250711.pdf>
- KNEKS. (2023). *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia*. Jakarta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

- Natsir, I. (2024) 'Pengaruh ekonomi syariah dalam pengembangan industri halal di Indonesia', *MUMTAZ: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*, 8(1), pp. 95–103. Tersedia di : <https://jurnalptiq.id/index.php/mumtaz/article/view/70/48>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia Tahun 2021–2025*. Jakarta: OJK.
- Purnama, I.D. (2026) 'Ekonomi Halal Global 2026 Diproyeksi Tembus USD3 Triliun, Ini Catatan Menag', *IDX Channel*, 22 April.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Saputri, OB. (2020). Potensi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia berdasarkan jumlah penduduk muslim. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, 5(2), 87–99. Tersedia di : <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/5127>
- Subari. (2026, 18 Mei). Wawancara mengenai manfaat program HIPMI Syariah bagi pelaku UMKM di Kabupaten Purwakarta [Komunikasi personal].
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi ke-5). Bandung: Alfabeta.